

PERAN DINAS PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN BONE BOLANGO

Kurniadi K. Hasan¹, Nur Mutmaina Otto², Regi Mokodongan³,
Novita Yusuf⁴, Sintia Rahmatia Abas⁵
Universitas Bina Taruna Gorontalo

yadiehz@gmail.com¹, nurmutmainaotto@gmail.com², regimokodongan@gmail.com³,
novitayusuf04@gmail.com⁴, sintiaabas4@gmail.com⁵

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pariwisata dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bone Bolango, dengan fokus khusus pada destinasi wisata di Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara langsung dengan informan dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Pariwisata dalam pengembangan pariwisata di Bone Bolango belum berjalan secara optimal. Meskipun beberapa aspek pengembangan telah dilaksanakan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala terutama dalam hal keterbatasan anggaran. Selain itu, beberapa kendala lainnya yakni berupa minimnya fasilitas dan infrastruktur penunjang pada sebagian besar destinasi wisata, serta upaya promosi pariwisata yang masih terbatas pada media sosial, belum memanfaatkan strategi promosi yang lebih luas dan efektif. Dari aspek aksesibilitas menuju destinasi wisata terbilang cukup baik, begitupun dengan potensi produk lokal yang cukup besar, tetapi belum didukung sepenuhnya oleh infrastruktur yang memadai.

Kata Kunci: Pengembangan, Pariwisata, Peran Dinas, Berkelanjutan

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the Tourism, Youth and Sports Office in developing the tourism sector in Bone Bolango Regency, with a special focus on tourist destinations in Bone Bolango Regency. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques are carried out through observation, direct interviews with informants and documentation. Data analysis is carried out through the stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study indicate that the role of the Tourism Office in developing tourism in Bone Bolango has not been running optimally. Although several aspects of development have been implemented well, in its implementation it still faces obstacles, especially in terms of budget limitations. In addition, several other obstacles include the lack of supporting facilities and infrastructure in most tourist destinations, as well as tourism promotion efforts that are still limited to social media, not utilizing broader and more effective promotional strategies. In terms of accessibility to tourist destinations, it is

quite good, as well as the potential for local products which are quite large, but have not been fully supported by adequate infrastructure.

Keywords: Development, Tourism Role of the Department, Sustainable

PENDAHULUAN

Pariwisata telah lama dikenal sebagai salah satu sektor kunci yang berperan besar dalam mendorong pembangunan ekonomi global. Berdasarkan laporan dari *World Tourism Organization* (UNWTO), industri ini berkontribusi sekitar 10% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dunia, menciptakan satu dari sepuluh pekerjaan global, serta menyumbangkan pendapatan devisa yang signifikan melalui kegiatan ekspor jasa pariwisata (WTTC, 2021). Fakta ini memperlihatkan bahwa pariwisata memiliki posisi strategis dalam memperkuat struktur ekonomi, terutama bagi negara berkembang yang memiliki potensi kekayaan wisata berbasis alam, budaya, serta sejarah yang kaya dan beragam. Selain itu, pariwisata juga berperan sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui aktivitas ekonomi berbasis wisata.

Dalam konteks nasional, sektor pariwisata di Indonesia memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2019, sektor ini menyumbangkan sekitar 4,7% terhadap PDB nasional dan menghasilkan lebih dari 13 juta lapangan kerja (BPS, 2022). Melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pemerintah secara aktif mendorong pengembangan kawasan wisata prioritas, salah satunya melalui program strategis “10 Bali Baru” yang bertujuan meningkatkan daya tarik dan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat internasional. Indonesia sendiri memiliki keunggulan berupa keberagaman potensi wisata alam, budaya, serta ekowisata yang menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan dalam pencapaian devisa dan percepatan pembangunan wilayah (Talalu & Sadewo, 2021). Namun demikian, karakter pariwisata yang sangat peka terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan menuntut adanya pengelolaan yang cermat dan kebijakan yang terintegrasi.

Di luar aspek ekonomi makro, pariwisata juga memainkan peran penting dalam membuka lapangan kerja baru, serta turut andil dalam pelestarian budaya dan lingkungan hidup. Sektor ini menyediakan peluang ekonomi bagi berbagai kalangan, mulai dari industri formal seperti perhotelan, jasa transportasi, hingga penyedia layanan pemandu wisata, serta sektor informal seperti pelaku UMKM di sekitar kawasan wisata. Hal ini sejalan dengan analisis Bank Dunia yang menyebutkan bahwa pariwisata dapat menjadi penggerak utama (*engine of growth*) dalam penciptaan pekerjaan di wilayah urban dan rural (Kemenparekraf, 2023; Awaloedin et al., 2024). Selain sebagai pendorong ekonomi, pariwisata juga menjadi sarana efektif dalam mengenalkan serta melestarikan seni, tradisi, dan nilai-nilai kearifan lokal kepada wisatawan, serta menjadi

alat untuk mempromosikan perlindungan ekologi melalui pengembangan model ekowisata berkelanjutan (Liu, 2020; Radhika & Johnson, 2017).

Walaupun memiliki potensi yang besar, pengembangan pariwisata masih menghadapi beragam tantangan. Diantaranya adalah kurangnya infrastruktur penunjang, belum optimalnya pengelolaan destinasi, serta rendahnya pemanfaatan teknologi informasi untuk tujuan promosi dan manajemen pariwisata (Hasan et al., 2024). Oleh sebab itu, diperlukan keterlibatan aktif pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata, untuk memastikan bahwa pengembangan sektor ini dilakukan dengan pendekatan strategis, partisipatif, dan berkelanjutan agar dampaknya mencakup dimensi ekonomi, sosial, maupun lingkungan secara seimbang (Firdaus, 2020).

Kabupaten Bone Bolango yang terletak di Provinsi Gorontalo merupakan salah satu daerah yang menyimpan potensi wisata alam luar biasa. Wilayah ini memiliki sejumlah destinasi unggulan seperti Pantai Botutonuo yang memikat, Danau Perintis dengan pemandangan alami yang memesona, Gua Telinga yang menampilkan formasi batuan unik, serta kawasan konservasi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone yang menjadi habitat berbagai spesies flora dan fauna endemik Sulawesi (Tui et al., 2023). Selain itu, keberadaan hutan hujan tropis di Bone Bolango juga membuka peluang pengembangan wisata berbasis ekologi seperti pengamatan satwa Maleo dan penelusuran sungai bawah tanah. Kekayaan ini menciptakan peluang besar bagi Bone Bolango untuk menjadi destinasi wisata unggulan baik di tingkat domestik maupun internasional (Djaafar & Mozin, 2022).

Namun, realisasi pengembangan sektor pariwisata di wilayah ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur dasar seperti akses jalan menuju objek wisata yang belum layak dan kurangnya fasilitas umum berstandar nasional. Kondisi ini menjadi hambatan utama bagi wisatawan yang hendak berkunjung (Suardana, 2013; Ardianto & Soehadi, 2013). Selain itu, upaya promosi yang dilakukan masih bersifat sporadis dan terbatas, sehingga banyak destinasi wisata di Bone Bolango belum mendapatkan segmentasi pasar pengunjung yang memadai secara nasional maupun global.

Tantangan lainnya adalah lemahnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan pelaku industri wisata dalam menciptakan model pengembangan pariwisata yang berkelanjutan (Niode & Rahman, 2022). Padahal, keterlibatan masyarakat merupakan elemen fundamental untuk memastikan bahwa pembangunan pariwisata memberikan dampak ekonomi yang inklusif, sekaligus menjaga kelestarian budaya dan lingkungan (Awaloedin et al., 2024). Misalnya, pengelolaan kawasan wisata alam sering kali dilakukan tanpa partisipasi aktif masyarakat lokal, yang berisiko menimbulkan konflik kepentingan serta menurunkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap aset wisata (Padli & Niswaty, 2024).

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango memiliki tanggung jawab strategis dalam menyusun kebijakan dan program pengembangan pariwisata yang terintegrasi dan berbasis potensi lokal. Langkah-langkah tersebut meliputi peningkatan sarana prasarana wisata, optimalisasi promosi berbasis digital, serta pemberdayaan komunitas lokal dalam pengelolaan destinasi (Fauzi, 2024; Ariyani et al., 2022; Sinaga et al., 2021). Maka dari itu, penting untuk dilakukan kajian yang komprehensif terkait efektivitas peran dinas dalam optimalisasi potensi pariwisata Bone Bolango, serta strategi konkret yang dapat diimplementasikan.

Sebagai lembaga teknis daerah, Dinas Pariwisata memiliki peran sentral dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, serta pelaksanaan program pengembangan sektor wisata (Pakaya et al., 2024). Selain pengelolaan destinasi, dinas ini juga memiliki mandat untuk memperkuat daya saing daerah melalui kegiatan promosi, peningkatan kapasitas SDM pariwisata, serta pembangunan infrastruktur pendukung (Kurniadi Hasan, et.al., 2024). Meski telah banyak potensi wisata di Bone Bolango, promosi yang dilakukan masih sangat terbatas sehingga jumlah kunjungan wisatawan tergolong rendah (Tui et al., 2023). Pelayanan sektor swasta juga masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam aspek akomodasi dan profesionalisme layanan turis. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menekankan bahwa pemerintah daerah melalui dinas terkait bertanggung jawab dalam pengelolaan pariwisata berbasis potensi lokal yang berorientasi pada kesejahteraan dan keberlanjutan (Pemerintah Indonesia, 2009; Ardianto & Soehadi, 2013). Oleh karena itu, keberhasilan pengembangan sektor ini sangat bergantung pada kualitas perencanaan, manajemen destinasi, dan promosi yang efektif (Hasan, 2023; Hakim et al., 2024)

Namun dalam praktiknya, berbagai kendala internal masih membatasi performa Dinas Pariwisata. Salah satu hambatan signifikan adalah keterbatasan anggaran. Data dari Kementerian Pariwisata mengungkapkan bahwa sebagian besar daerah hanya mengalokasikan 1–3% dari total APBD untuk sektor pariwisata, jauh dari angka ideal untuk mendukung pengembangan destinasi yang kompetitif (Maranatha et al., 2023). Konsekuensinya, banyak program strategis yang telah dirancang tidak dapat dijalankan secara maksimal.

Kendala lain yang krusial adalah rendahnya pemanfaatan teknologi informasi, khususnya dalam promosi digital dan manajemen destinasi wisata (Hasan et al., 2024). Banyak instansi pemerintahan yang masih menggunakan metode promosi secara konvensional atau tradisional yang tidak mampu lagi bersaing dalam era digitalisasi global saat ini. Minimnya integrasi promosi melalui platform digital menyebabkan potensi wisata lokal kurang dikenal secara luas (Agnes, D. et al, 2015; Hanggraito & Sanjiwani, 2020).

Lebih lanjut, minimnya keterlibatan masyarakat juga menjadi faktor penghambat. Keberhasilan pembangunan pariwisata sangat ditentukan oleh partisipasi aktif warga lokal. Kurangnya pelibatan komunitas dalam perencanaan dan pengelolaan menyebabkan pengembangan destinasi menjadi kurang relevan dengan kebutuhan lokal serta berisiko tidak berkelanjutan. Bappenas menegaskan bahwa pelibatan masyarakat tidak hanya penting dari aspek keberlanjutan, tetapi juga untuk pemerataan manfaat ekonomi (Hakim et al., 2024).

Mengingat kompleksitas tantangan tersebut, diperlukan studi yang mendalam mengenai peran Dinas Pariwisata dalam merespons berbagai kendala dan merumuskan strategi pengelolaan yang inovatif dan efektif. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana Dinas Pariwisata Bone Bolango dapat mengoptimalkan perannya sebagai penggerak utama dalam pengembangan pariwisata daerah.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya pemahaman mendalam terhadap fungsi strategis Dinas Pariwisata dalam mengelola potensi besar yang dimiliki Bone Bolango yang kaya akan keindahan alam seperti pantai, Danau, dan hutan tropis. Terlepas dari kekayaan tersebut, tantangan seperti keterbatasan anggaran dan infrastruktur, belum optimalnya teknologi promosi, serta minimnya partisipasi masyarakat lokal tetap menjadi hambatan utama. Melalui pendekatan analisis kebijakan dan peran kelembagaan, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan serta menyusun strategi yang dapat diimplementasikan secara konkret untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing pariwisata Bone Bolango di ranah nasional maupun internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam peran Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango dalam pengembangan sektor pariwisata berbasis potensi lokal (Sugiyono, 2019). Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap dinamika, persepsi, dan strategi kelembagaan secara kontekstual, terutama dalam kaitannya dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan promosi destinasi, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata. Penelitian ini juga mempertimbangkan sensitivitas sektor pariwisata terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga pendekatan kualitatif dianggap paling tepat untuk mengeksplorasi realitas di lapangan secara holistik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi (Gunawan, 2022). Observasi dilaksanakan di beberapa lokasi wisata unggulan di Bone Bolango untuk memahami kondisi infrastruktur, pelayanan, dan partisipasi masyarakat. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan seperti pejabat Dinas Pariwisata, pengelola destinasi wisata, pelaku UMKM,

serta wisatawan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata. Sementara itu, dokumentasi meliputi pengumpulan data sekunder melalui artikel, laporan, perencanaan program dinas, serta dokumen kebijakan yang relevan guna memperkuat validitas temuan lapangan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Miles, 2014). Triangulasi sumber data diterapkan untuk meningkatkan keabsahan hasil, dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi secara menyeluruh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Pariwisata dalam Pengembangan Objek Wisata di Kabupaten Bone Bolango

Penelitian ini berupaya mengkaji untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango dalam pengembangan sektor pariwisata lokal, dengan fokus pada tiga aspek utama, yaitu pengembangan destinasi, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), serta kepuasan wisatawan terhadap layanan dan fasilitas yang tersedia. Sebagai lembaga teknis daerah yang memiliki tanggung jawab dalam perencanaan dan pengelolaan kepariwisataan, dinas ini memegang peran strategis, baik sebagai regulator, fasilitator, maupun inisiator dalam mendorong pengembangan potensi wisata yang ada.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bone Bolango sebagian besar berlandaskan pada regulasi formal, seperti Undang-Undang Kepariwisata serta Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penyelenggaraan pariwisata. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Pariwisata (Y.A), beliau menyampaikan bahwa salah satu strategi utama dalam memperkuat pengelolaan destinasi adalah melalui pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pokdarwis ini telah dibentuk di hampir seluruh desa yang memiliki potensi wisata dan berfungsi sebagai ujung tombak pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan objek wisata. Strategi ini sejalan dengan semangat pengembangan pariwisata berbasis komunitas (*community-based tourism*), yang menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai pelaku utama dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Keberhasilan pendekatan ini terbukti dari capaian prestasi yang diraih oleh Kabupaten Bone Bolango, seperti penghargaan Desa Wisata selama dua tahun berturut-turut. Meskipun pencapaian ini membanggakan, namun (Y.A) juga mengakui masih banyak tantangan yang dihadapi, terutama terkait keterbatasan anggaran, kurangnya promosi pariwisata berbasis digital, dan minimnya infrastruktur pendukung di sejumlah lokasi wisata. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata

tidak hanya bergantung pada potensi sumber daya alam, tetapi juga pada efektivitas kebijakan dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Sekretaris Dinas Pariwisata (H.K) menambahkan bahwa salah satu regulasi kunci yang menjadi fondasi pengembangan adalah Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA). Dokumen ini menjadi acuan utama dalam perencanaan jangka menengah dan panjang, serta dalam pelaksanaan kebijakan strategis yang berorientasi pada keberlanjutan. Dalam praktiknya, RIPPDA berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan zonasi wisata, prioritas pengembangan, dan identifikasi kebutuhan infrastruktur dan SDM pariwisata. Selain itu, Dinas juga menjalankan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan retribusi pajak daerah dari sektor pariwisata, yang menjadi salah satu sumber utama PAD.

Kepala Bidang Pengelolaan Destinasi (Y.M) menyatakan bahwa seluruh kebijakan yang diambil oleh Dinas Pariwisata senantiasa disesuaikan dengan karakteristik lokal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, pengelolaan destinasi wisata di kawasan perbukitan dan pesisir tentunya memerlukan pendekatan yang berbeda, baik dari segi aksesibilitas, jenis fasilitas yang dibutuhkan, maupun bentuk promosi yang relevan. Beliau juga menyampaikan bahwa keberadaan RIPPDA menjadi penting untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan tidak bersifat ad-hoc atau temporer, tetapi berkesinambungan dan berdasarkan kajian yang objektif.

Dalam wawancara lanjutan, Koordinator Pengembangan Destinasi menyampaikan bahwa Dinas Pariwisata telah melakukan berbagai inisiatif untuk mengatasi permasalahan yang muncul di lapangan. Beberapa upaya tersebut antara lain adalah menjalin kemitraan dengan pihak swasta dan lembaga donor, penguatan pelatihan dan pendampingan kepada Pokdarwis, serta penggunaan platform media sosial dan digital untuk meningkatkan jangkauan promosi destinasi. Namun, diakui bahwa efektivitas dari inisiatif tersebut masih belum maksimal karena keterbatasan SDM, anggaran, dan rendahnya literasi digital pada sebagian aparatur dan masyarakat

Indikator Keberhasilan Pengembangan Objek Wisata di Kabupaten Bone Bolango

Keberhasilan pengembangan objek wisata di suatu daerah dapat diukur melalui sejumlah indikator yang mencerminkan keberlanjutan, dampak sosial-ekonomi, serta peningkatan kualitas destinasi dan layanan. Dalam konteks Kabupaten Bone Bolango, penelitian ini mengidentifikasi beberapa indikator kunci yang menjadi tolok ukur keberhasilan Dinas Pariwisata dalam upaya mengembangkan potensi wisata secara optimal. Indikator tersebut mencakup: kualitas produk wisata, aksesibilitas, keterlibatan pelaku lokal, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), serta kepuasan wisatawan.

Salah satu indikator yang teridentifikasi adalah kualitas produk wisata yang telah dikembangkan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, beberapa destinasi wisata

di Bone Bolango telah menunjukkan kemajuan dari sisi pengemasan atraksi lokal menjadi produk wisata unggulan. Misalnya, potensi wisata alam seperti Danau Perintis, Gua Telinga, dan Pantai Botutonuo telah berhasil diposisikan sebagai ikon daerah yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sarat dengan nilai edukasi dan budaya. Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya dinas dalam menjalin kolaborasi dengan masyarakat setempat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama dalam penyediaan souvenir, makanan lokal, serta jasa pemandu wisata. Dukungan terhadap UMKM turut menjadi aspek penting dalam menggerakkan ekonomi lokal berbasis pariwisata.

Selain itu, indikator lainnya yang menjadi perhatian adalah aksesibilitas menuju lokasi wisata. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa akses ke beberapa destinasi utama telah mengalami perbaikan. Beberapa lokasi wisata sudah bisa dijangkau dengan waktu tempuh relatif lebih singkat, yakni berkisar antara 30 menit hingga 1 jam perjalanan dari pusat kota, dengan jarak tempuh antara 7,7 km hingga 12 km. Perbaikan akses jalan ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan memberikan kenyamanan dalam pengalaman berwisata. Aksesibilitas yang memadai juga membuka peluang investasi dan pengembangan fasilitas wisata secara lebih luas.

Meski demikian, masih terdapat lokasi wisata yang belum tersentuh pengembangan infrastruktur secara optimal. Beberapa desa yang memiliki potensi wisata alam masih terkendala dengan kondisi jalan yang sempit, belum beraspal, atau tidak memiliki penunjuk arah yang memadai. Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Pariwisata untuk memastikan adanya pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah yang berpotensi menjadi destinasi unggulan. Dengan demikian, indikator aksesibilitas tidak hanya dilihat dari jarak dan waktu tempuh, tetapi juga dari kualitas fasilitas transportasi, keberadaan rambu informasi, dan kemudahan akses untuk semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas.

Indikator lain yang tidak kalah penting adalah partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata, yang tercermin melalui aktifnya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di berbagai desa. Pokdarwis tidak hanya berfungsi sebagai pengelola harian destinasi, tetapi juga menjadi jembatan antara pemerintah daerah dan komunitas dalam menyampaikan aspirasi serta mengidentifikasi kebutuhan lapangan. Aktivitas Pokdarwis yang efektif menjadi tolok ukur utama dalam pendekatan *community-based tourism*, di mana pengembangan dilakukan dengan mengedepankan kearifan lokal dan keberlanjutan sosial. Beberapa Pokdarwis bahkan telah berhasil menginisiasi atraksi lokal seperti festival budaya dan pelatihan kerajinan tangan sebagai bagian dari paket wisata, yang berdampak positif terhadap citra dan diferensiasi destinasi.

Di sisi lain, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata juga menjadi indikator yang signifikan dalam menilai efektivitas kebijakan pengembangan. Meski kontribusi PAD dari sektor ini belum maksimal, terdapat tren peningkatan yang positif dalam dua tahun terakhir, seiring dengan bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan dan penerapan sistem retribusi pada beberapa objek wisata. Kebijakan pajak retribusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi sumber pendapatan yang penting dan dapat digunakan kembali untuk memperbaiki sarana dan prasarana wisata, pelatihan SDM, serta kegiatan promosi. Meski demikian, transparansi pengelolaan retribusi dan alokasi anggaran untuk sektor pariwisata masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Terakhir, tingkat kepuasan wisatawan juga menjadi ukuran keberhasilan yang sangat penting. Meskipun belum terdapat sistem survei formal dan periodik yang dilakukan oleh dinas, hasil observasi dan wawancara dengan beberapa wisatawan menunjukkan bahwa mereka cukup puas dengan keindahan alam dan keramahan masyarakat lokal. Namun, masih terdapat keluhan terkait fasilitas dasar seperti kebersihan, sanitasi, tempat istirahat, dan papan informasi yang minim di sejumlah destinasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan destinasi belum sepenuhnya disertai dengan peningkatan kualitas layanan dan fasilitas pendukung. Untuk meningkatkan kepuasan wisatawan, Dinas Pariwisata perlu mengembangkan sistem umpan balik dan evaluasi rutin terhadap layanan wisata, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor seperti dinas perhubungan, dinas kebersihan, dan pelaku usaha lokal.

Secara keseluruhan, indikator keberhasilan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bone Bolango menunjukkan bahwa telah terdapat kemajuan yang berarti, terutama dalam aspek pelibatan masyarakat dan perbaikan aksesibilitas. Namun demikian, masih diperlukan strategi lanjutan untuk memperkuat promosi berbasis digital, mengoptimalkan pemanfaatan PAD, serta membangun sistem monitoring dan evaluasi berbasis data untuk meningkatkan kualitas layanan wisata secara berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan pariwisata tidak hanya diukur dari segi kuantitas kunjungan, tetapi juga kualitas pengalaman wisatawan, peningkatan ekonomi lokal, serta keberlanjutan lingkungan dan budaya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai peran Dinas Pariwisata dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Bone Bolango, dapat disimpulkan bahwa dinas pariwisata telah memainkan peran yang strategis dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata daerah. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada aspek regulatif dan administratif, tetapi juga mencakup fasilitasi, advokasi, dan penguatan kapasitas masyarakat serta pelaku usaha lokal di sektor pariwisata.

Pertama, dari aspek pengembangan destinasi wisata, Dinas Pariwisata telah menunjukkan inisiatif yang signifikan, diantaranya dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di hampir seluruh desa wisata. Langkah ini memperlihatkan komitmen dalam mendorong pendekatan pembangunan pariwisata berbasis komunitas (*community-based tourism*). Selain itu, adanya dokumen perencanaan strategis seperti Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) menjadi acuan penting dalam pelaksanaan program yang lebih terarah dan berkelanjutan. Upaya pengembangan produk wisata juga berjalan dengan baik, terutama melalui pemanfaatan potensi alam dan budaya lokal sebagai daya tarik utama.

Kedua, dari aspek indikator keberhasilan pengembangan pariwisata, penelitian ini menemukan bahwa beberapa parameter telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Produk wisata di beberapa lokasi telah dikemas secara baik dan menarik, aksesibilitas menuju destinasi juga relatif memadai dengan waktu tempuh rata-rata 30 menit hingga 1 jam dari pusat kota, serta adanya kolaborasi dengan UMKM yang turut menghidupkan ekonomi lokal. Keberadaan Pokdarwis dan pelibatan masyarakat menjadi faktor penting yang mendukung keberlanjutan pariwisata di daerah.

Ketiga, dalam kaitannya dengan dampak ekonomi dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD belum maksimal, terdapat tren peningkatan yang positif. Pengelolaan retribusi dan promosi wisata yang lebih terstruktur melalui media digital mulai memberikan efek terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Namun demikian, masih terdapat tantangan yang dihadapi, terutama menyangkut keterbatasan anggaran, belum meratanya pembangunan infrastruktur, serta belum optimalnya integrasi teknologi informasi dalam sistem promosi dan pelayanan pariwisata.

Keempat, dinas pariwisata juga telah berupaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pariwisata, baik melalui pelatihan, edukasi, maupun pendampingan terhadap pelaku wisata lokal. Hal ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pelayanan pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing. Dinas Pariwisata juga menjadi penghubung antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam membangun sinergi untuk pengembangan pariwisata daerah yang berkelanjutan.

Secara umum, meskipun masih menghadapi kendala, peran Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango dalam pengembangan sektor pariwisata telah menunjukkan tren yang progresif. Dalam jangka panjang, keberhasilan ini dapat terus ditingkatkan dengan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan, memperluas promosi wisata melalui platform digital, dan memastikan bahwa pembangunan sektor pariwisata dilakukan dengan prinsip keberlanjutan, inklusivitas, dan berbasis potensi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes, D., Supranoto, & Hermanto, R. (2015). Peran Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata di Kabupaten Jember. *Ilmu Administrasi Negara Universitas Jember*, 1(1), 1–15.
- Ardianto, E., & Soehadi, A. W. (2013). *Consumunity Marketing*. Prasetiya Mulya.
- Ariyani, R. M., Dhameria, V., & Suyitno, S. (2022). Pengaruh daya tarik wisata dan promosi media sosial terhadap minat berkunjung kembali wisatawan di waduk setu patok kabupaten cirebon. *JPEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen dan Keuangan*, 6(2), 133–147.
- Awaloedin, D. T., Fitri, N. I., Putra, S. S., & Pradini, G. (2024). Involvement of Local Communities in the Development of Batulayang Tourism Village. *International Journal of Education, Information Technology, and Others*, 7(2), 200–204.
- BPS. (2022). *Statistik Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2018-2021* Kementerian N Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif RI. Pusat Data dan Sistem Informasi - Kemenparekraf dan Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan - BPS.
- Djaafar, L., & Mozin, N. (2022). The role of the government in the management of tourism object development of kurenai beach botubarani village, Kabila Bone Bone Bolango regency. *International Journal on Social Science, Economics and Art*, 12(2), 53–59.
- Fauzi, M. H. (2024). Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan potensi Desa Ekowista: Studi deskriptif di Desa Nagrapageuh Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Firdaus, R. (2020). Peran pemerintah daerah sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator dalam pemberdayaan petani kakao di Kabupaten Luwu Utara.
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara.
- Hakim, A., Rahmani, N. A. B., & Harahap, R. D. (2024). Peran Pemerintah Dalam Program Pariwisata Berkelanjutan Dalam Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Kawasan Danau Toba. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 7(1), 419–433.
- Hanggraito, A. A., & Sanjiwani, N. M. G. (2020). Tren Segmentasi Pasar dan Perilaku Wisatawan Taman Bunga Amaryllis di Era 4.0. *Journal of Tourism and Creativity*, 4(1), 43–58.
- Hasan, K. K. (2023). The Influence of Transformational Leadership and Work Motivation on Employee Performance: Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan. *MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary*, 1(1), 39–48.
- Hasan, K. K., Latala, F., Mokodongan, R., & Djaba, M. (2024). Pengembangan Kawasan Wisata Danau Perintis Sebagai Destinasi Wisata Berkelanjutan Berbasis Smart Tourism. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 11, 1513–1526. <https://doi.org/10.37606/publik.v11i4.1642>
- Kemenparekraf. (2023). *Laporan Tahunan: Penguatan Smart Tourism dan Ekonomi*

- Kreatif Daerah. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- Liu, S.-T. (2020). Comparing the perspectives of municipal tourism departments and cultural departments on urban cultural-tourism development. *Journal of Destination Marketing & Management*, 16, 100432.
- Maranatha, E. G., Rini, E. S., & Situmorang, S. H. (2023). analysis of the influence of brand image, service quality and store atmosphere on customer satisfaction Cafe Ruang Sarca Medan. *Architecture*, 4, 3–95.
- Miles, M. B. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage.
- Niode, I. Y., & Rahman, E. (2022). Desain pengembangan potensi UMKM berbasis ekonomi kreatif dan pariwisata bahari dan implikasinya terhadap ketahanan ekonomi wilayah (studi di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(3).
- Padli, A., & Niswaty, R. (2024). The Role of the Tourism Office in Tourism Development in Selayar Islands Regency. *Journal of Social Science and Economics (JOSSE)*, 1–7.
- Pakaya, N. A., Pariono, A., & Hasan, K. K. (2024). Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Pedagang Pasar Tradisional di Kecamatan Ponelo Kabupaten Gorontalo Utara. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 14110–14116.
- Pemerintah Indonesia. (2009). Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
- Radhika, P. C., & Johnson, J. (2017). Identifying Government's Role towards Developing Sustainable Strategies in Tourism Industry. *Pacific Business Review International*, 10(6).
- Sinaga, K., Nasution, M. A., & Dewi, A. T. (2021). Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat. *Publik*, 8(1), 79–90.
- Suardana, I. W. (2013). Analisis kebijakan pengembangan pariwisata. Seminar Nasional: Unud.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Talalu, T. R., & Sadewo, B. A. (2021). Manajemen komunikasi pariwisata: bone bolango dan pandemi covid-19. *Islamic Communication Journal*, 6(2), 223–232.
- Tui, F. P., Ilato, R., Isa, R., Abdussamad, J., Bobihu, A., & Hunaini, M. (2023). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Di Kawasan Pesisir Kabupaten Bone Bolango. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 10(1), 332–342.
- WTTC. (2021). World Travel & Tourism Council (WTTC) represents the Travel & Tourism sector globally.